

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inklusi keuangan merupakan sebuah sistem keuangan yang memberikan kemudahan akses kepada seluruh agen ekonomi agar mempunyai akses yang sama terhadap layanan keuangan (Sarma, 2008). Terutama bagi masyarakat kurang mampu, kelompok masyarakat rentan di pedesaan, perempuan dan keluarga dengan penghasilan rendah yang diuntungkan melalui kebutuhan dasar layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, pembayaran dan asuransi (Chibba, 2009).

Kemudahan akses layanan keuangan yang diberikan inklusi keuangan tersebut menjadikan inklusi keuangan sebagai alat dinamis yang ideal untuk mencapai stabilitas multidimensional makroekonomi. Seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan pengurangan pengangguran di beberapa negara maju dan berkembang (Khan et al., 2022).

Demirguc-Kunt et al (2016) mengatakan bahwa untuk mencapai stabilitas multidimensional makroekonomi terdapat beberapa hambatan. Yaitu keberadaan diskriminasi pasar dan tingkat pendapatan yang tidak merata, tingkat kemiskinan yang tinggi di berkembang. Hal tersebut menyebabkan jutaan masyarakat dunia menjadi *unbanked* dan tidak dapat mengakses layanan keuangan. Hal ini mengakibatkan potensi kehilangan tabungan dan investasi yang cukup besar. Inklusi keuangan hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menyediakan *household dan* perusahaan akses yang lebih besar ke sumber daya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah banyak melakukan usaha dalam mencapai stabilitas dimensional makroekonomi. Salah satu upaya tersebut adalah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 yang kemudian diperbaharui menjadi Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNKI). Beberapa tujuan yang dimuat dalam SNKI adalah sebagai berikut: (a). Perluasan akses layanan keuangan formal. (b). Pengembangan wilayah berbasis internet di seluruh Indonesia. (c). Pendalaman sektor jasa keuangan. (d). Memperkuat perlindungan nasabah dan konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan.

Tabel 1.1 Peringkat Indeks Inklusi Keuangan negara-negara ASEAN di tingkat ASEAN dan Dunia tahun 2022

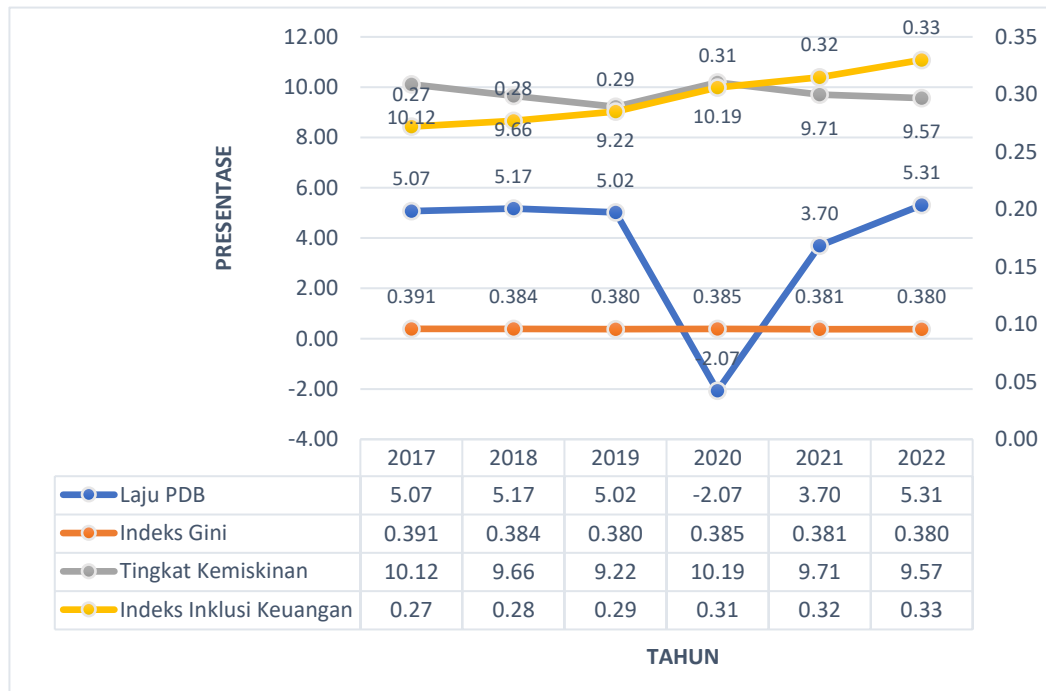
Negara	Indeks Inklusi Keuangan (IIK)	Peringkat IIK di ASEAN	Peringkat IIK di Dunia
Singapura	70.17	1	1
Thailand	52.30	2	20
Malaysia	50.35	3	23
Indonesia	41.98	4	30
Vietnam	28.08	5	39

Sumber: Principal Financial Group (2022).

Berdasarkan tabel 1.1 Indonesia menduduki peringkat ke-4 di ASEAN dan ke-30 di dunia dari 42 negara di dunia dengan nilai Indeks Inklusi Keuangan (IIK) sebesar 41.98 . Posisi Indonesia berdasarkan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) sangat jauh jika dibandingkan dengan Thailand yaitu sebesar 52.30 point dan berada di peringkat ke-2 ASEAN dan ke-20 dunia. Sedangkan Malaysia dengan 50.35 point dan berada di peringkat ke-3 ASEAN dan 23 dunia.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia yang cukup rendah diantara Singapura, Thailand dan Malaysia merupakan bukti bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam pengembangan inklusi keuangan di Indonesia. Untuk melihat seberapa jauh perkembangan inklusi keuangan selama 6 tahun terakhir,

peneliti berusaha untuk menghitung indeks inklusi keuangan dan membandingkan dengan variabel makroekonomi seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik 2023

Gambar 1.1 Laju PDB, Tingkat Kemiskinan, Indeks gini dan Indeks Inklusi Keuangan di Indonesia tahun 2017-2022

Berdasarkan gambar 1.1 di mana tahun 2020 merupakan tahun terendah dengan nilai PDB -2.07 dan tertinggi di tahun 2022 dengan nilai PDB 5.31. Sedangkan indeks gini mengalami stagnasi dari tahun 2017 hingga 2020 dengan rata-rata nilai sebesar 0.38. Tingkat kemiskinan terus berfluktuasi dari tahun 2017 hingga 2022, di mana titik terendah berada di tahun 2019 dengan nilai 9.22 dan tertinggi berada di tahun 2020 dengan nilai 10.19. Sedangkan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2022 tetapi nilai

tersebut masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Rendahnya inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2017-2022, menjadi bukti bahwa inklusi keuangan di Indonesia masih belum ideal untuk mencapai stabilitas multidimensional makroekonomi. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia perlu mempercepat realisasi Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNKI) Nomor 114 tahun 2020 untuk mencapai stabilitas dimensional makroekonomi. Khususnya berfokus terhadap 2 tujuan SNKI yaitu perluasan layanan keuangan formal dan pengembangan wilayah berbasis internet di seluruh Indonesia.

Kedua tujuan SNKI tersebut sangat mempengaruhi pengukuran dari Indeks Inklusi Keuangan (IIK) yaitu proxy tradisional dan proxy digital. Pada tujuan pertama yaitu perluasan layanan keuangan formal, sangat berpengaruh terhadap pengukuran proxy tradisional dari inklusi keuangan. Proxy tradisional merupakan proxy inklusi keuangan yang dikembangkan oleh Sarma (2008). Proxy ini menghitung Indeks Inklusi Keuangan (IIK) berbasis *financial development*, intermediasi keuangan dan indikator agregat pasar keuangan. Proxy ini terdiri dari 3 dimensi yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan layanan perbankan dan kegunaan layanan perbankan (Sarma, 2008).

Menurut Ahmad (2021) Indeks Inklusi Keuangan (IIK) yang berbasis proxy tradisional masih memiliki beberapa hambatan dan kelemahan, dimana hambatan yang dihadapi meliputi biaya yang cukup mahal, hambatan geografis dan asimetris informasi. Sedangkan kelemahannya adalah tidak mampu memberikan gambaran mengenai layanan keuangan secara holistik dan komprehensif. Hal ini dikarenakan perhitungan proxy tradisional sudah terlalu lama yaitu 15 tahun sejak awal dikembangkan pada tahun 2008.

Selama periode 15 tahun tersebut, proxy tradisional ini tidak ada perkembangan serta pembaharuan. Sedangkan layanan keuangan saat ini sudah sangat berbeda kondisinya dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu. Dan banyak dari penelitian di Indonesia bahkan penelitian 2-4 tahun terakhir yang masih menggunakan proxy tradisional untuk mengukur Indeks Inklusi Keuangan (IIK) pada penelitian yang mereka lakukan. Tentunya hal tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, dimana sudah banyak kemajuan dibidang layanan keuangan dengan bantuan teknologi digital. Seperti adanya *e-money*, dompet digital (gopay, shopeepay, OVO, dana, *LINK-aja*), *m-banking*, QRIS, keberadaan BANK-LINK seperti BRI-LINK, keberadaan bank digital (Bank Jago, Neo Bank, Line Bank, Jenius Bank) dan *fintech* pinjaman *online* legal. Namun keberadaan produk layanan keuangan digital tersebut tidak diperhitungkan dalam proxy tradisional inklusi keuangan.

Maka dari itu, perlu dilakukan pengukuran tambahan dari Indeks Inklusi Keuangan (IIK) berbasis teknologi digital yang mampu melengkapi kelemahan dan hambatan yang dimiliki proxy tradisional yaitu proxy digital inklusi keuangan. Proxy digital inklusi keuangan yang dibantu oleh teknologi digital dapat memecah hambatan yang dimiliki oleh layanan keuangan tradisional seperti biaya yang cukup tinggi, hambatan geografis, dan asimetri informasi (Zhang et al., 2020).

Khera et al (2022) mengatakan bahwa pesatnya penerapan teknologi digital di bidang keuangan digital menawarkan potensi yang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan digital. Berbeda dengan inklusi keuangan tradisional, inklusi keuangan digital mampu menyediakan layanan keuangan digital berbiaya lebih rendah jika dibandingkan layanan keuangan tradisional. Menyadari potensi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukan

kedua tujuan dari inklusi keuangan tradisional dan inklusi keuangan digital kedalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Beberapa penelitian terdahulu seperti menghasilkan bukti empiris bahwa keberadaan teknologi digital melalui finansial teknologi atau *fintech* mampu meningkatkan akses ke layanan keuangan digital secara masif, khususnya kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan akses tersebut akibat dari kelemahan yang dimiliki proxy tradisional inklusi keuangan.

Ji et al (2021) menyebutkan bahwa keberadaan layanan keuangan digital dapat memenuhi kebutuhan bagi pengguna berpenghasilan rendah. Bahkan dengan saldo rekening yang tidak banyak dan volume transaksi yang kecil, keberadaan layanan keuangan digital mampu memberikan keuntungan bagi pengguna dan juga penyedia jasa layanan keuangan. Dan manfaat ini mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Ozili (2020) peningkatan inklusi keuangan mampu memperbanyak jumlah deposito perbankan sebagai sumber utama dari kredit, dengan adanya akses kredit ini diharapkan mampu meningkatkan performa dari sektor riil. Menurut Demircuc-kunt (2015) selain memberikan akses keuangan, inklusi keuangan mampu meningkatkan *growth inclusive*. *Growth inclusive* adalah kondisi ketika akses keuangan memungkinkan pelaku ekonomi untuk mengambil bagian dalam kegiatan investasi partisipatif jangka panjang yang secara signifikan akan meningkatkan pengelolaan keuangan, dan mengurangi sumber kredit informal bersifat eksploitatif seperti rentenir.

Anindyntha et al (2021) keberadaan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) mampu mengukur sejauh mana pemerintah membuat strategi dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah

baik di tingkat provinsi maupun kota. Neaime & Gaysset (2018) menunjukkan adanya hubungan negatif antara inklusi keuangan dan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini disebabkan karena ketika terjadi kenaikan *money supply* atau *bank credit* yang mana berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang miskin dan meningkatkan transaksi finansial yang mendorong kepada kesempatan akumulasi modal, distribusi pendapatan dan konsumsi. Dengan adanya peningkatan dari Deposit, Kredit dan PDRB mengindikasikan perlu mempercepat perluasan akses inklusi keuangan demi menunjang kelancaran dalam pembayaran, tabungan maupun pinjaman atau kredit. Dengan demikian kenaikan dari *Financial Inclusion Index (FII)* perlahan akan naik dan diikuti dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Ahmad et al (2021) menemukan bukti empiris bahwa inklusi keuangan digital dan *human capital* mendorong pertumbuhan ekonomi di China secara masif. Hal ini salah satunya dikarenakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan digital memberikan biaya rendah terutama untuk lokasi terpencil dan sulit terjangkau di China. Mereka menggunakan proxy digital inklusi keuangan sebab proxy tradisional tidak mampu memberi gambaran secara menyeluruh terkait inklusi keuangan dari sisi digital. Selain itu dalam penelitiannya, ia melibatkan indeks pembangunan manusia sebagai variabel tambahan, yang hasilnya adalah IPM memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan digital.

Malik et al (2022) menegaskan dalam penelitiannya bahwa negara-negara asia yang memiliki rasio inklusi keuangan yang tinggi ternyata berdampak pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di negara tersebut. Artinya semakin tinggi tingkat inklusi keuangan

maka semakin bagus tingkat pertumbuhan ekonomi diikuti dengan rendahnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di negara tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat keterbatasan atau gap studi dari penelitian sebelumnya. Dimana pada penelitian terdahulu mereka hanya menggunakan proxy tradisional dari Indeks Inklusi Keuangan (IIK) berdasarkan *financial development*, intermediasi keuangan dan indikator agregat sebagai indikator Indeks Inklusi Keuangan (IIK) yang dikembangkan oleh Sarma (2008). Melalui perhitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) berdasarkan proxy tradisional, penelitian terdahulu tidak mampu memberikan gambaran secara holistik dan komprehensif pada penelitian yang mereka lakukan.

Hal tersebut dikarenakan penelitian terdahulu hanya mengukur berdasarkan jumlah cabang perbankan, jumlah ATM, jumlah kartu debit dan dana pihak ketiga per provinsi. Sedangkan keberadaan proxy digital inklusi keuangan yang meliputi jumlah pembayaran elektronik berdasarkan *server based*, jumlah merchant mesin EDC, jumlah pelanggan seluler per 100 populasi dewasa dan populasi pengguna internet per 100.000 populasi dewasa tidak diikutsertakan dalam penelitian sebelumnya. Dimana berdasarkan penelitian terdahulu proxy digital inklusi keuangan yang dibantu oleh adanya teknologi digital mampu mengatasi hambatan dan kelemahan yang dihadapi oleh proxy tradisional seperti biaya yang relatif rendah dan murah, hambatan geografis dan asimetris informasi.

Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif, peneliti berupaya menggabungkan antara proxy tradisional yang dikembangkan oleh Sarma (2008) dan proxy digital yang dikembangkan oleh Khera (2021) sehingga tercipta indeks inklusi keuangan yang lebih komprehensif berdasarkan perhitungan terbaru menggunakan *Principal Analysis Component (PCA)* yang

dikembangkan oleh Khera (2021). Dengan terbentuknya Indeks Inklusi Keuangan (IIK) kemudian peneliti ingin menganalisis hubungan variabel IIK dengan variabel makro ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Karena alasan tersebut maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Keterkaitan kausalitas antara inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan dengan inklusi keuangan di Indonesia tahun 2017-2022 (Studi kasus 33 Provinsi)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh antara inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Bagaimana respon ketimpangan pendapatan akibat shock yang diberikan inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah dibuat, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh antara inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia .
2. Menganalisis dan mengetahui respon yang diberikan ketimpangan pendapatan akibat shock yang diberikan inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai riset pembaharuan mengenai penelitian inklusi keuangan di Indonesia. Peneliti berharap, penelitian

ini dapat dikembangkan oleh penelitian berikutnya dan menjadi rujukan alternatif terkait perhitungan indeks inklusi keuangan komprehensif terbaru.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa. Khususnya terutama bagi Bank Indonesia, praktisi, regulator dan untuk *further research*, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan inovatif terkait Inklusi keuangan di Indonesia kedepannya.